

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) awalnya dikemukakan oleh Edwin Locke (1968) yang mengatakan adanya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). *Goal setting theory* merupakan salah satu bentuk teori motivasi. Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan oleh organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya.

Menurut teori ini salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus mendesak sampai tujuan tercapai. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kerja yang ingin dicapai oleh individu. *Goal setting theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Teori ini juga menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja) yang diikuti dengan kemampuan dan keteampilan kerja.

Berdasarkan pendekatan *goal setting theory*, kinerja instansi pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuannya, sedangkan variabel *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai faktor penentu. Jika faktor tersebut diterapkan secara baik maka kinerja pemerintah daerah yang baik akan tercapai.

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen and Meckling (1976) teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan keagenan dimana pihak pemegang saham (*principal*) melibatkan ataupun menyewa pihak lain yaitu manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Teori keagenan dapat terjadi pada berbagai organisasi termasuk organisasi sektor publik. Pada organisasi sektor publik, pemerintah berperan sebagai agen dan masyarakat berperan sebagai prinsipal. Pemerintah yang berperan sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi. Masyarakat yang berperan sebagai prinsipal berkewajiban memonitor kerja pemerintah agar tujuan organisasi dapat dicapai dan tercapai akuntabilitas publik.

2.3 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui

dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil (Nasir dan Oktari, 2011). Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006).

Menurut Mahsun (2006:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu. Kinerja biasanya diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah diterapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang telah dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Menurut Mardiasmo (2009: 121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendali organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Lebih lanjut lagi Mardiasmo menjelaskan pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah

berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

2. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
3. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Bastian (2006:267) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

- a) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Input* sebagai langkah awal dari penyusunan indikator kinerja pemerintah dimulai dari rencana program tahunan, dalam penentuan kegiatan pemerintah memerlukan data dan informasi serta setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal. Perencanaan awal melihat bagaimana cara mencapai suatu tujuan.
- b) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Penerapan

indikator *output* merefleksikan bagaimana organisasi melihat kejelasan dan ketelitian pegawai dalam melaksanakan program kerja, serta memaparkan seberapa besar rencana berhasil dilaksanakan.

- c) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil dari suatu perencanaan diharapkan dapat menilai kualitas hasil program kerja yang sesuai dengan sasaran dan tujuan.
- d) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan proses yang berkelanjutan sampai pada menetapkan indikator yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dan program kerja, serta adanya pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program.
- e) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan program akan menjamin pola pertanggungjawaban di organisasi. Penetapan indikator *impact* menentukan kinerja pelaksanaan program yang lebih baik dan kompeten.

2.4 Good Governance

Secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)

kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 275).

Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/ berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.

Munculnya konsep *good governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan *stakeholder*-nya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Trisnainingsih, 2007).

Good governance sering dikatakan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dari segi pandang *United Nations Development Programme* (UNDP), *good governance* dikatakan baik (*good*) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat. Sementara *World Bank* memberikan pengertian tentang *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi,

nepotisme (KKN), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan *legal* dan *political framework* bagi timbulnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009).

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN. Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara (Aisyah, 2014).

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi (*participation*), mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Kepastian Hukum (*rules of law*), mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi (*transparency*), menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.
4. Responsif (*responsiveness*), meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
5. Orientasi Konsensus (*consensus orientation*), meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinthan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

6. Kesetaraan (*equity*), memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
7. Efisien dan Efektif (*efficiency and effectiveness*), menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
8. Akuntabilitas (*accountability*), usaha meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
9. Visi Strategis (*strategic vision*), membangun daerah berdasarkan visi strategis dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

Menurut Mardiasmo (2009), karakteristik good governance yang seharusnya ada dalam sektor publik adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan value of money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

1. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga spek, yaitu adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi

sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, serta berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif.

2. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

4. *Value of Money* (Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas)

Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi, pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013) teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan,

mengambil memanipulasi atau menampilkan data. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu *software* dan yang lebih terpenting lagi adalah orang. Dengan perkataan lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa:

1. Perangkat keras (*hardware*).
2. Perangkat lunak (*software*), dan
3. Orang (*brainware*)

Perangkat lunak (*software*) atau dikenal juga dengan sebutan program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Perangkat keras (*hardware*) mencakup segala peralatan fisik yang dipakai dalam sistem teknologi informasi, sedangkan orang (*brainware*) merupakan komponen penentu keberhasilan sistem yang menerapkan teknologi informasi. Komponen *brainware* dapat berupa pemakai, pemelihara dan pembuat sistem.

Menurut Jogiyanto (2008) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintahan seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya (Supada, 2010 dalam Nurlaili, 2014).

PP No. 56 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka membangun jaringan sistem informasi yang terpadu untuk tercapainya tata kelola yang baik dan dapat mengendalikan akses antar unit kerja sehingga meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku saat menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

Trihapsoro (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap seseorang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, akses terhadap proses dari kegiatan organisasi dapat dilakukan dengan cepat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dan pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

2.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern menurut *Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO, 2013) adalah:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasional, pelaporan dan kepatuhan.

Afrianti (2011) dalam Nurlaili (2014) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan berlaku. Pada tingkat organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan lapoean

keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 180), Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Inten Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan adanya sistem pengendalian intern pemerintah adalah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
- b. Keandalan pelaporan keuangan

- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur pembentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang diadopsi dari COSO terdiri atas:

a. Lingkungan pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian mewajibkan pimpinan instansi pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dan kepemimpinan yang kondusif.

b. Penilaian risiko

Unsur penilaian risiko mewajibkan pimpinan instansi pemerintah melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko yang mungkin terjadi. Penilaian risiko dilakukan dengan menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan.

c. Kegiatan pengendalian

Unsur kegiatan pengendalian mewajibkan pimpinan instansi pemerintah menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

d. Informasi dan komunikasi

Unsur informasi dan komunikasi mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

e. Pemantauan pengendalian intern

Unsur pemantauan pengendalian intern mewajibkan pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan sistem pengendalian intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah sudah pernah dilakukan dijadikan referensi dan pedoman bagi peneliti. Secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
1.	Yuanida, Meitika (2010)	The Effect of Good Governance Implementation on Government Agency Performance	Independen : X1: Faktor – Fraktor Good Governance X2 : Prinsip – prinsip Good Governance Dependen : Y: Kinerja instansi pemerintah	1. Hasil menjelaskan bahwa Prinsip-Prinsip Good Governance secara parsial juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Prinsip-Prinsip Good Governance terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah.

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
2.	Chici Claraini (2017)	The Effect Of Good Governance, Government Internal Control System And Leadership Style On Regional Government Performance	Independen : X1: Good Governance X2 : Sistem Pengendalian X3 : Gaya Kepemimpinan Dependen : Y: Kinerja instansi pemerintah	1. Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah 2. Pengawasan Kualitas Laporan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja 3. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur pemerintah bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
3.	Jongho Roh (2018)	Improving the government performance management system in South Korea	Independen : X1: Sistem Manajemen Dependen : Y: Kinerja instansi pemerintah	1. Sistem manajemen kinerja pemerintah telah berdampak positif pada pemerintah kinerja Namun demikian, akan terlalu dini untuk menilai situasi saat ini sebagai
4.	Osama Isaac , Zaini Abdullah , T. Ramayah , Ahmed M. Mutahar (2017)	Internet Usage, User Satisfaction, Task-Technology Fit, and Performance Impact among Public Sector Employees in Yemen	Independen : X1: Penggunaan Internet X2 : Kepuasan Pengguna X3 : Kesesuaian tugas teknologi Dependen : Y: Kinerja instansi pemerintah	1. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum penggunaan aktual internet (frekuensi penggunaan dan durasi penggunaan) oleh karyawan di lembaga pemerintah, meningkat keharusan untuk menggunakan internet untuk mencapai tugas-tugas pekerjaan dan membuat internet cocok dengan tugas-tugas pekerjaan mereka. 2. Hasil menunjukkan bahwa karyawan sangat setuju bahwa menggunakan Internet membantu: (1) meningkatkan proses tugas mereka (menyelesaikan tugas dengan cepat dan menyelesaikan tugas dengan mudah), (2) perolehan pengetahuan (memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, menghasilkan ide-ide inovatif, membantu belajar), (3) meningkatkan kualitas komunikasi (komunikasi antara karyawan, komunikasi antara karyawan dan klien, diskusi karyawan dan pengiriman layanan), sementara cukup

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
				setuju bahwa internet membantu meningkatkan kualitas keputusan (mengidentifikasi masalah, melibatkan orang lain dalam membuat keputusan dan membuat keputusan yang berkualitas lebih tinggi).
5.	Haiyan Jiang, Honghui Zhang (2018)	Regulatory restriction on executive compensation, corporate governance and firm performance Evidence from China	Independen : X1: Penggunaan Internet X2 : Kepuasan Pengguna X3 : Kesesuaian tugas teknologi Dependen : Y: Kinerja instansi pemerintah	1. Temuan kami juga menunjukkan perusahaan yang sehat tata kelola, seperti kontrol internal yang efektif dan pemegang saham institusional aktif pemantauan, lebih bermanfaat dari pada melegalkan tingkat gaji eksekutif.
6.	Tiki Heldika (2019)	Influence of budgeting participation, clarity of budget objectives, organizational culture, transparency and internal control on local government performance	Independen : X1: Partisipasi Penyusunan Anggaran X2 : Kejelasan Sasaran Anggaran X3 : Budaya Organisasi X4 : Transparansi Intern X5 : Pengendalian Intern Dependen : Y: Kinerja instansi pemerintah	1. partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 2. kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 3. budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 4. transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 5. pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
7.	(Rosma Simangunson g 2014)	<i>The Impact of Internal Control Effectiveness and Internal Audit Role toward the Performance of Local Government</i>	Independen : X1 : Efektifitas pengendalian intern X2 : peran audit intern Dependen : Y : Kinerja pemerintah daerah	1. Efektifitas pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 2. Peran audit intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
8.	(Muslim A. Djalil, dkk 2017)	<i>The Effect of Used Information Technology, Internal Control, and Regional Accounting System on the Performance of City Governance Agency of Banda Aceh, Indonesia</i>	Independen : X1 : Pemanfaatan teknologi X2 : Sistem pengendalian intern X3 : sistem akuntansi keuangan daerah Dependen : Y : Kinerja instansi pemerintah daerah	1. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah . 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. 3. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah .
9.	(Larcker, David F, et al. 2007.)	<i>Corporate Governance, Accounting Outcomes, and Organizational Performance</i>	Independen : X1 : Indeks <i>Corporate Governance</i> Dependen : Y : <i>Abnormal Accrual, Earning Restatement, Future Operating Performance, Future Stock Return</i>	Peneliti menemukan indeks <i>Governance</i> mereka berhubungan dengan <i>Future Operating Performance</i> dan <i>Excess Stock Return</i> akan tetapi indeks ini memiliki hubungan yang beragam dan sederhana dengan <i>Abnormal Accrual</i> dan hampir tidak memiliki hubungan dengan <i>Accounting Restatement</i> .

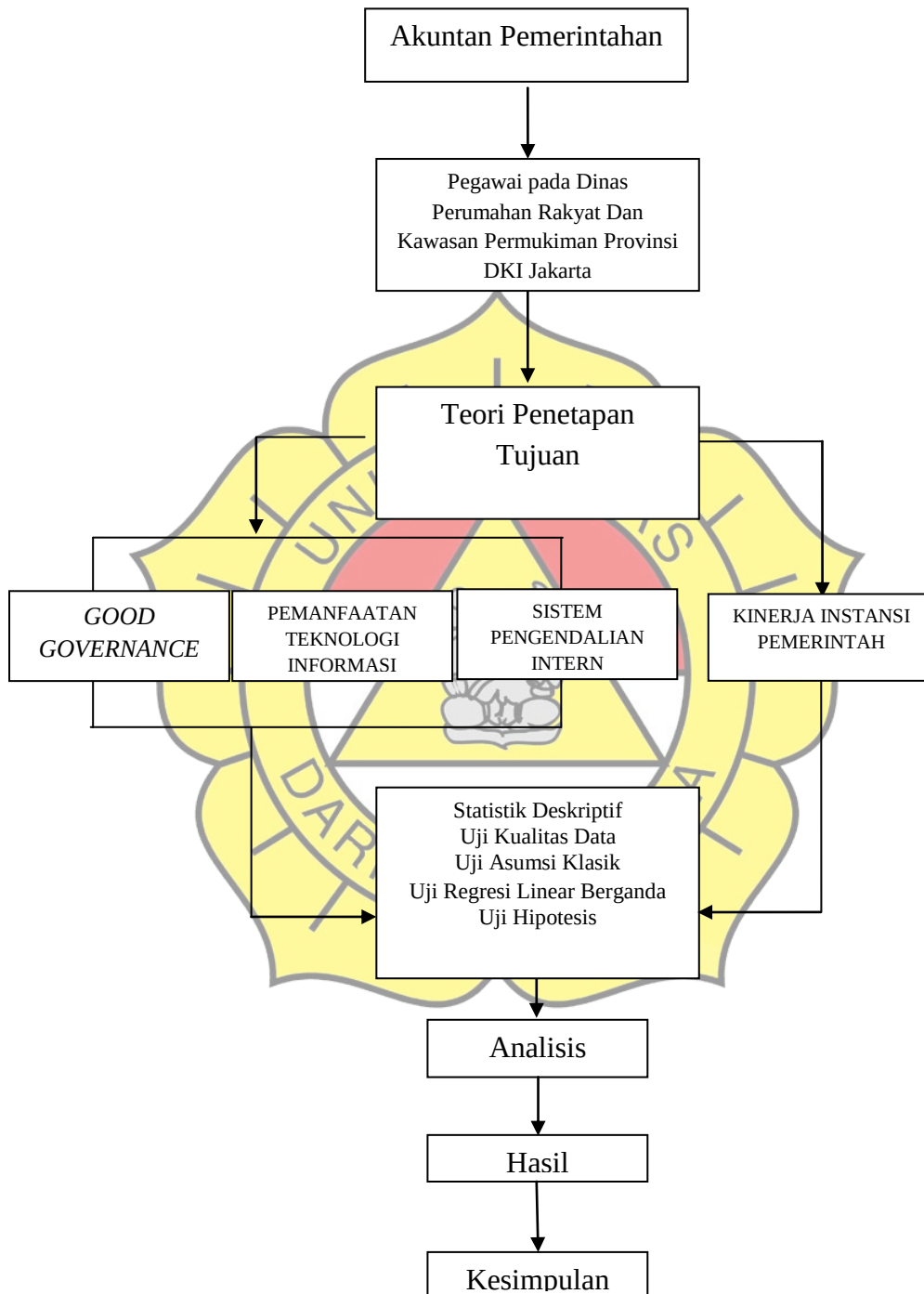
2.8 Kerangka Pemikiran

Adanya tuntutan terselenggaranya manajemen yang akuntabel dan transparan mendorong pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). Pelaksanaan *good governance* di lingkungan pemerintah diharapkan dapat terselenggara pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan sehingga akan diperoleh kinerja pemerintah yang baik.

Selain itu, kinerja pemerintah juga dapat meningkat dengan didukung oleh sarana dan pra sarana yang menunjang pekerjaan pemerintah. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan berdampak pada cara kerja birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang baik. Hal tersebut akan berdampak pula pada peningkatan kinerja pemerintah.

Kinerja pemerintah yang baik dapat terwujud dengan adanya sistem pengendalian intern yang dapat memberikan kontrol kepada pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern ini akan mengarahkan individu maupun kelompok untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai organisasi. Sistem pengendalian intern diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi di pemerintahan sehingga kinerja pemerintah dapat dinilai baik oleh rakyat.

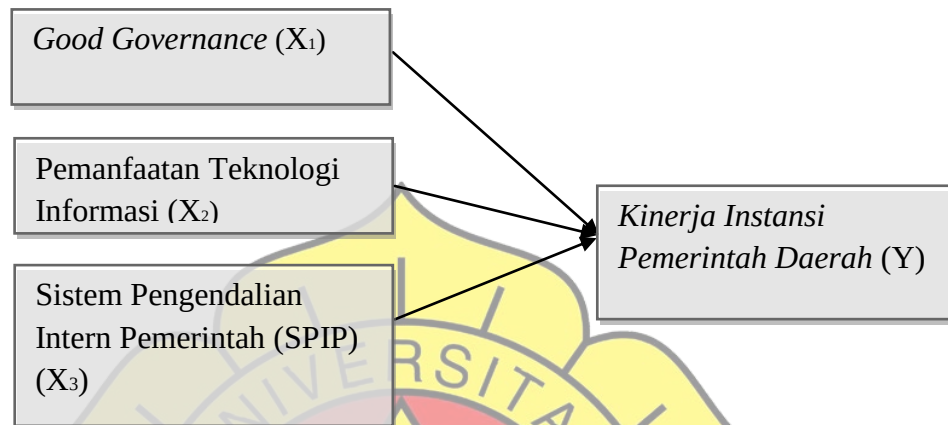
Berdasarkan dari uraian di atas dan penjelasan tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran**

2.9 Model Variabel

Gambar 2.2

Model Variabel



Keterangan :

X₁ : *Good Governance* (Transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan *value of money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas)

X₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi (sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi)

X₃ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.)

Y : Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Model Variabel ini untuk menunjukan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi DKI Jakarta.

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Hubungan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah

Penerapan *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja sektor publik dapat optimal apabila didukung oleh adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan transparan.

H₁: *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.10.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap seseorang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Secara umum pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak positif karena memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya. Jadi jika

teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.10.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan adanya sistem SPIP yang baik dan dilaksanakan dengan optimal diharapkan akan memberikan pengaruh kepada kinerja instansi pemerintah.

H₃: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah